

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penelitian ini mencakup landasan teori-teori yang berkaitan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah. Selain itu, dalam tinjauan pustaka ini menguraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dengan demikian dapat merumuskan hipotesis dan model penelitian.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Menurut Kuznet dalam jinghan (2012:57), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologi yang diperlukan.

2.1.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

a. Teori Ekonomi Klasik

Menurut pandangan Adam Smith dan David Ricardo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk,

jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Dari keempat faktor tersebut menitikberatkan teori pada penambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Adapun gambaran teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi ketika jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak dan tersedianya lahan tanah yang masih luas.
2. Pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang (*stationeary state*) saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun.

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan mengenai pentingnya pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini menyebutkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut yaitu dengan memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru (Todaro, 2006).

Teori ini juga mengemukakan bahwa analisisnya dimulai dengan memisahkan perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang namun tidak akan berlangsung lama. Ketika keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang memberikan keuntungan. Dengan investasi yang baru maka akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi pula. Kenaikan yang terjadi akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang serta melakukan penanaman modal baru.

c. Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod serta mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:

1. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital-Output* atau *ICOR*).

Dalam teori ini disebutkan bahwa apabila ingin tumbuh maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu tumbuh (Sadono Sukirno, 2006). Teori ini juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya tingkat tabungan dan investasi di mana jika tingkat tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, meningkatkan PAD suatu daerah dapat mengelola dari sumber daya yang dimiliki sehingga menambah pendapatan daerah.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi. PAD merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut guna melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Dalam melihat kemampuan suatu daerah dari segi keuangannya guna mengurangi ketergantungannya akan pemerintah pusat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melihat bagaimana komposisi dari penerimaan daerah tersebut. Jika komposisi PAD semakin besar, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya, jika semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin besar.

2.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.2.2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Adapun pembagian pajak daerah sesuai pasal 2 UU No. 34 Tahun 2000 adalah:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

- e. Pajak Rokok;
2. Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.2.2. Retribusi Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar atau pemakai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau badan.

- a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi alat pemadam kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan terulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3. Retribusi tempat pelelangan;
4. Retribusi terminal;
5. Retribusi tempat khusus parkir;
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
7. Retribusi rumah potong hewan;
8. Retribusi pelayanan ke pelabuhan;
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
10. Retribusi penyebrangan di air; dan
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan;
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

3. Retribusi izin gangguan;
4. Retribusi izin trayek; dan
5. Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.1.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahannya. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN;
3. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.1.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yaitu:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah;
6. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
14. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.1.3. Penanaman Modal Dalam Negeri

2.1.3.1. Pengertian Investasi

Menurut Sukirno (2010) dalam (Wahyuni, Sukarsa, dan Yuliarmi 2014), investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut dengan penanaman modal. Penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri.

Dalam bukunya Samuelson dan Nordhaus (2003: 136) menyebutkan bahwa investasi mengarah pada akumulasi modal yang bisa meningkatkan *output* potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Investasi diartikan meliputi penambahan stok modal atau barang di suatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun (Samuelson, 2004:198). Suatu penambahan pada pendapatan akan mendorong peningkatan investasi, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi. Walaupun suatu perusahaan lain memilih menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut dari pada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Investasi menjadi komponen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong pada tingkat perdagangan dan produksi sehingga akan berakibat pada peningkatan pendapatan perkapita sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Dhaniswara (Harjono, 2012), berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminology penanaman modal dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (*direct investment*)

Investasi langsung merupakan bentuk penanaman modal secara langsung, di mana investor terlibat aktif dalam kegiatan pengolahan usaha dan bertanggung jawab secara langsung jika terjadi kerugian.

2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Investasi tidak langsung atau penanaman modal jangka pendek merupakan penanaman modal seperti jual beli saham atau mata uang. Kegiatan transaksinya dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

2.1.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan

Ramalan mengenai tingkat keuntungan di masa yang akan datang akan memberikan gambaran pada para investor mengenai jenis-jenis prospek yang dapat dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

2. Tingkat bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanam berupa persentase keuntungan neto, modal yang besar diperoleh dari tingkat bunga.

3. Kemajuan teknologi

Dengan adanya kemajuan teknologi maka akan menyebabkan semakin banyak kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh pengusaha, sehingga tinggi tingkat investasi yang dicapai.

4. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya

Bertambahnya pendapatan nasional akan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat meningkat, begitu pula dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Total *agregat demand* yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain.

5. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong pengusaha untuk menyediakan bagian keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.

2.1.3.4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan disebutkan pada pasal:

1. Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Ayat 2).
2. Penanam modal dalam negeri merupakan perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Ayat 5).
3. Modal dalam negeri merupakan modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Ayat 9).

2.1.3.5. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Berikut ini merupakan manfaat dari penanaman modal dalam negeri:

- a. Mampu menghemat devisa;
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing;
- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang;
- d. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2.1.3.6. Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di antaranya sebagai berikut:

- a. Potensi dan karakteristik suatu daerah;

- b. Budaya masyarakat;
- c. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional;
- d. Peta politik daerah dan nasional;
- e. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

2.1.3.7. Teori Investasi

Menurut Priyono dan Chandra (2016: 64-67), terdapat tiga teori yang membahas mengenai investasi yaitu:

1) Teori Klasik

Secara garis besar investasi dalam teori ini yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi akan dijalankan jika pendapatan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga. Apabila akan membandingkan antara pendapatan dari investasi dengan suku bunga maka harus mengingat juga tentang barang modal yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Sehingga pendapatan dari investasi merupakan jumlah pendapatan yang akan diterima setiap tahun, selama pengguna barang modal dalam produksi, jumlah pendapatan tiap tahun selanjutnya dengan tingkat uang yang berlaku sekarang.
- b. Investasi dalam salah satu barang modal merupakan sebuah keuntungan jika biaya ditambah dengan bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan oleh investasi. Maka unsur yang diperhitungkan dalam perhitungan investasi adalah tingkat ongkos atas modal, tingkat bunga, dan tingginya hasil pendapatan yang diterima.

2) Teori Keynes

Keynes berpandangan bahwa masalah investasi yang ada baik penentuan jumlah kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan pada konsep *Marginal Efficiency of Investment* (MEI). Dengan konsep bahwa investasi akan tetap berjalan apabila MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga. Grafik dalam kurva MEI digambarkan menurun. Kurva ini menjelaskan tentang jumlah investasi yang akan terlaksana pada setiap suku bunga. Terdapat dua hal yang menyebabkan kurva MEI menurun yaitu:

- a. Semakin banyak investasi yang terlaksana pada masyarakat maka MEI akan semakin rendah.
- b. Semakin banyak investasi yang akan dilaksanakan maka ongkos dan barang modal menjadi lebih tinggi.

3) Teori Akselerasi

Digdowaiseso (2016: 61-66) menjelaskan bahwa teori akselerasi ditemukan oleh Bickerdike dan J.M. Clark pada tahun 1910-an. Teori akselerasi merupakan teori investasi yang didasarkan pada hubungan yang kaku di antara barang modal dengan tingkat pendapatan nasional yang dihasilkan. Teori ini mengemukakan bahwa rasio antara stok modal dengan nilai produksi yang didapatkan diharapkan adalah tetap.

2.1.4. Jumlah Industri

2.1.4.1. Pengertian Industri

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya di mana tempat seseorang bekerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 2, industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2.1.4.2. Pengertian Industri Pengolahan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi dengan mesin ataupun dengan tangan.

Perusahaan atau usaha industri merupakan suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, serta mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada

seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Adapun perusahaan industri pengolahan terbagi ke dalam 4 golongan yaitu:

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri tersebut hanya didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tidak dengan bagaimana perusahaan itu menggunakan mesin tenaga kerja atau tidak, dan tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu. Adapun klasifikasi subsektor industri pengolahan dibagi menjadi:

1. Industri Makanan dan Minuman;
2. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
3. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki;
4. Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya;
5. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman;
6. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional;
7. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik;
8. Industri Barang Galian bukan Logam;
9. Industri Logam Dasar;

10. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; dan
11. Industri Pengolahan Lainnya.

Industri pengolahan dipandang sebagai pendorong atau penggerak bagi perekonomian suatu negara umumnya negara yang masih berkembang.

2.1.4.3. Teori Pertumbuhan Industri

Teori Kaldorian merupakan teori yang menganggap bahwa sektor industri pengolahan merupakan mesin pertumbuhan bagi suatu wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat tiga aspek industri yang disorot yaitu:

1. Pertumbuhan GDP mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan;
2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan industri pengolahan itu sendiri;
3. Pertumbuhan sektor non-industri pengolahan mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan industri sektor industry pengolahan, di mana hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan sektor non-industri pengolahan yang mengarah pada *diminishing return to scale*.

Selain itu, teori ini menyebutkan bahwa *increasing to scale* hanya dapat terwujud dengan akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Faktor investasi menjadi sorotan tersendiri dalam pengembangan teori karena investasi mampu

memberikan *manufacturing incentive* yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri. Sehingga dibutuhkan tingkat investasi yang tinggi untuk dapat memperbaharui mekanisme teknik dari produksi.

Sektor industri disebut sebagai *leading sector* atau sektor pemimpin. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Sektor jasa juga turut berkembang dengan berdirinya lembaga keuangan, lembaga pemasaran, dan sebagainya yang semuanya akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.

2.1.5. Pengeluaran Pemerintah

2.1.5.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi (Sukirno, 2011:61). Pengeluaran pemerintah mencerminkan bagaimana kebijakan dari pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebijakan tersebut. Dalam kebijakan fiskal terdapat beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus, serta anggaran defisit.

2.1.5.2. Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah

Menurut Bastian (2006:205) di Indonesia pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintah sehari-hari yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi pembayaran angsuran, serta bunga utang negara. Anggaran belanja rutin mempunyai peran yang penting guna menunjang berjalannya suatu pemerintahan. Melalui pengeluaran rutin ini, pemerintah akan mampu menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja negara dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengeluaran

pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang bersifat *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan kembali pembayaran dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang bersifat *reproduktif*, yaitu mewujudkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Contohnya: pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya: untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagiannya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran yang bersifat tidak produktif, yaitu pengeluaran pemerintah yang tidak memberikan pengaruh pada peningkatan perekonomian atau pemborosan. Contohnya: pengeluaran untuk membiayai perang.

5. Pengeluaran yang bersifat penghematan masa mendatang, misalnya untuk penyantunan anak yatim, jika dimulai sejak dini maka biayanya akan lebih ringan. Karena biaya-biaya untuk pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.

2.1.5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

1. Belanja Pemerintah Pusat

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 yaitu belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah dan belanja lain-lain. Belanja pemerintah terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya dan membayar honorium, lembur dan asuransi kesehatan atau kontribusi sosial.

b. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa serta biaya pemeliharaan aset.

c. Belanja Modal

Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Belanja modal ini dirinci atas belanja modal fisik dan belanja modal non-fisik.

d. Pembiayaan Bunga Utang

Pembayaran bunga utang merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang meliputi utang dalam negeri maupun luar negeri.

e. Subsidi

Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta.

f. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menggambarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan.

g. Bantuan Sosial

Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat, untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dan kompensasi sosial.

h. Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

2. Belanja Untuk Daerah

Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Suminto, 2004:27). Belanja untuk daerah ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

2.1.5.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori pengeluaran pemerintah yaitu identitas keseimbangan pendapatan nasional ($Y = C + I + G (X - M)$). Dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional. pemerintah perlu memperhitungkan sasaran antara yang

menikmati dan terkena kebijakan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta (Dumiary, 2006:42).

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022. Adapun penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Determinan Penghasilan Asli Provinsi Jawa Barat (Sandi Mulyadi dan Jeihan Ali Azhar, 2022)	Variabel independen: - Jumlah Pengeluaran Pemerintah Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - Jumlah penduduk Variabel dependen: -	- Secara simultan variabel PDRB, jumlah pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2020. - Secara parsial hanya variabel PDRB yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2020.
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018 (Aris Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, dan Eranus Yoga Kudhani)	Variabel independen: - Pengeluaran Pemerintah Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - Inflasi - PDRB - Jumlah Penduduk - Jumlah Wisatawan Variabel dependen: -	Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 terbukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Wisatawan terhadap 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Sedangkan Jumlah Penduduk terbukti tidak signifikan mempengaruhi PAD 35 kabupaten/kota di

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Jawa Tengah.
3.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2014 (Dwi Hastuti, Encang Kadarisman dan Aab Abdul Rohman)	Variabel independen: - Pengeluaran Pemerintah Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB Variabel dependen: -	- Secara bersama-sama variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2014, secara individu pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Barat. - PDRB berpengaruh positif dan signifikan dengan taraf signifikan 5 persen terhadap PAD Provinsi Jawa Barat.
4.	Peran Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten Tahun 2011-2015 (Nia Safitri,	Variabel independen: - Jumlah Industri Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB Industri - Belanja daerah - Pajak Daerah Variabel dependen:	- Belanja daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD. - PDRB Industri signifikan dan berpengaruh secara negatif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2018)		-	terhadap PAD. - Pajak daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PAD. - Jumlah industri signifikan dan berpengaruh terhadap PAD.
5.	Analisis Pengaruh PDRB, PMDN, dan PMA Terhadap PAD Tahun 2013-2017 di Wilayah Bali Menggunakan Regresi Panel (Edy Widodo, Bayu Galih Prianda, Annisa Ayunda, dan Vita Grasella, 2019)	Variabel independen: - PMDN Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - PMA Variabel dependen: -	- PDRB dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. - Variabel yang memberikan pengaruh terbesar terhadap PAD adalah PDRB yakni sebesar 0,0964 dengan pengaruh positif. - Nilai intersep untuk setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda.
6.	Analisis Pengaruh PDRB, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di	Variabel independen: - PMDN Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - PMA - Jumlah hotel Variabel dependen:	- PDRB dan Jumlah Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali periode 2010-2015. - PMA dan PMDN berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi Bali Periode 2010-2015 (Rahim Hardianto, 2021)			negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali periode 2010-2015.
7.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010) (Nuwun Priyono)	Variabel independen: - Pengeluaran Pemerintah Daerah - Jumlah Industri Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - Jumlah Penduduk Variabel dependen: -	- PDRB secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang, sedangkan variabel lainnya (Pengeluaran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. - PDRB, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang.
8.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel Independen: - Pengeluaran Pemerintah Variabel	Variabel Independen: PDRB - Jumlah penduduk	- PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Aceh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi Aceh (Julia Saputri dan Ichsan, 2022)	Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel Dependen: -	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB tidak mempengaruhi peningkatan PAD di Provinsi Aceh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi peningkatan PAD di Provinsi Aceh. - Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan PAD di Provinsi Aceh.
9.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah	Variabel independen: - Pengeluaran Pemerintah	Variabel independen: - Jumlah Penduduk	- Secara parsial Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar (Muh Ikram Idrus dan Irma, 2017)	Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel dependen: -	signifikan terhadap PAD dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. - Secara simultan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD.
10.	Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011 (Ifan Restu Bagus Pamungkas, 2013)	Variabel independen: - PMDN Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - PMA Variabel dependen: -	- PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati. - PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati. - PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.
11.	Peran Sektor Industri Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (Heri Hermawan, Fajar Ramdhani dan Intan Ramdaniulfritri)	Variabel independen: - Jumlah Industri Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - Tenaga Kerja Variabel dependen: -	Tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan ketika terjadi peningkatan tenaga kerja akan menaikkan PAD Kota Bekasi. PDRB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Industri memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, hal ini menunjukkan Ketika terjadi peningkatan pada PDRB Industri maka akan menaikkan PAD Kota Bekasi. Akan tetapi pada penelitian ini belum menemukan hubungan yang signifikan antara jumlah perusahaan industry dengan PAD Kota Bekasi.
12.	Analisis Pengaruh PDRB, PMDN, dan PMA terhadap PAD Tahun 2013-2017 di Wilayah Bali (Edy Widodo, Bayu Galih, Annisa Ayunda, dan Vita Grasella)	Variabel independen: - PMDN Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel independen: - PDRB - PMA Variabel dependen: -	Dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh bahwa variabel PDRB dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.
13.	Determinan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jalu Aldho Fajar Prasetyo, 2023)	Variabel independen: - Pengeluaran Pemerintah - PDRB Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel independen: - Jumlah Penduduk Variabel dependen: -	- Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dalam jangka waktu yang singkat dan jangka waktu yang lama terhadap PAD

(1)	(2)	(3) (PAD)	(4)	(5)
				<p>karena peningkatan pengeluaran dapat meningkatkan PAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk hanya mempengaruhi PAD dalam jangka waktu yang singkat. - PDRB pada jangka waktu yang singkat dan jangka waktu yang lam tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dikarenakan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan daerah belum mampu memaksimalkan.
14.	Pengaruh PMDN dan PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016	Variabel independen: - PMDN Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PMA Variabel dependen: -	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Rini Hayati Lubis dan Fitriyani, 2018)			asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.
15.	Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2017-2021 (Gunawan Bayu Aji, 2023)	Variabel independen: - Jumlah Industri Variabel dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel independen: - PDRB - Jumlah Penduduk - Belanja Daerah Variabel dependen: -	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara PDRB, Jumlah Industri, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap PAD.

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memudahkan penulis dalam penelitian, maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Jumlah Industri, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.

2.2.1. Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mankiw (2007) investasi dapat membantu pemerintah untuk menargetkan perekonomian serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat pada jangka waktu yang panjang. Dalam penelitian ini, investasi dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mempunyai tujuan sama dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu mendorong perekonomian daerah. Peningkatan penanaman modal di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD. PMDN dalam hal ini berkorelasi positif terhadap PAD, jika terjadi peningkatan PMDN maka akan meningkatkan PAD, begitupun sebaliknya. Peningkatan PMDN dapat mendorong pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi daerah. Di samping itu, dengan adanya kegiatan penanaman modal diharapkan dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada di daerah. Jika angkatan kerja tersebut mempunyai keterampilan serta kemampuan, maka akan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dapat memberikan kontribusi pula bagi PAD.

Adapun hubungan positif antara PMDN dengan PAD telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Ifan Restu Bagus Pamungkas (2013) yang menyatakan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai koefisien sebesar 1,205790 dan signifikan pada derajat kepercayaan $\alpha = 5\%$.

2.2.2. Hubungan Jumlah Industri dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Safitri (2018), salah satu faktor penting dalam pembentukan pendapatan daerah adalah perkembangan industrialisasi. Banyak sekali industri

yang berkembang di setiap daerah, mulai dari industri kecil hingga industri yang besar. Adapun setiap industri tersebut memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar dan terhadap keuangan negara khususnya di daerah-daerah yang banyak mempunyai jumlah industri meskipun secara tidak langsung juga memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitar yaitu pembuangan limbah sembarangan atau tidak membayar pajak yang merugikan negara. Akan tetapi, secara umum sektor perindustrian memberikan nilai yang menguntungkan seperti industri besar sedang yang memberikan kontribusi besar bagi negara (Hertanto dan Sriyana, 2013).

Adapun hubungan positif antara Jumlah Industri dengan PAD telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Nuwun Priyono (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah Industri berpengaruh signifikan terhadap PAD, dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 49,826 dengan probabilitas 0,000.

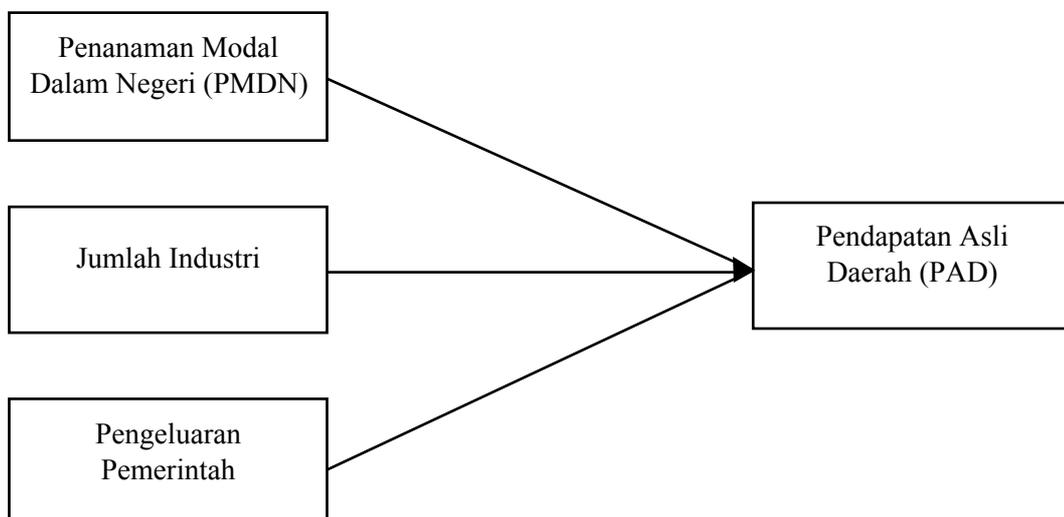
2.2.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Danuega (2022), melalui kebijakan fiskal, pemerintah suatu daerah dapat menggunakan variabel pengeluaran pemerintah untuk mendorong perekonomian daerah. Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah haruslah bersifat dapat dimanfaatkan dalam jangka yang panjang serta dinikmati oleh masyarakat luas. Seperti halnya saat ini, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang sedang gencar untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang memadai maka akan memberikan peranan esensial bagi masyarakat dalam kegiatan perekonomian jangka panjang. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah

mempunyai korelasi yang positif terhadap PAD. Konsumsi pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan daerah secara efektif dan efisien akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan PAD. Jika terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah maka dapat meningkatkan PAD, begitupun sebaliknya.

Adapun hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah dengan PAD telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Dwi Hastuti, Encang Kadarisman dan Aab Abdul Rohman (2016) yang menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD, ditandakan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0001 < 0,05$. Hal ini terlihat ketika pemerintah melakukan belanja pemerintah (APBD) di mana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat publik, ketika terjadinya pengeluaran pemerintah (APBD) akan meningkatkan nilai PAD.

Secara lebih rincinya, kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Pikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PMDN, jumlah industri dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022.
2. Diduga secara simultan PMDN, jumlah industri, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022.